

**PERAN FAO DALAM MENGATASI STUNTING MELALUI WORLD  
FOOD PROGRAMME (WFP) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*



**Disusun Oleh:**

**ANDI MASTY KURNIATI ADHA**

**E061191089**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**PERAN FAO DALAM MENGATASI STUNTING MELALUI WORLD  
FOOD PROGRAMME (WFP) DI INDONESIA**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ANDI MASTY KURNIATI**

**E061191089**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

**DEPARTMENE ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN FAO DALAM MENGATASI STUNTING MELALUI  
*WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DI INDONESIA*

N A M A : ANDI MASTY KURNIATI ADHA

N I M : E061191089

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 10 Januari 2024

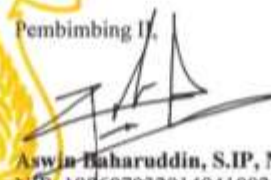
Mengetahui :

Pembimbing I,



**Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

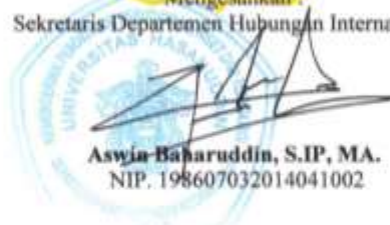
Pembimbing II,



**Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



**Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**  
NIP. 198607032014041002

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN FAO DALAM MENGATASI STUNTING MELALUI  
*WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DI INDONESIA*

N A M A : ANDI MASTY KURNIATI ADHA

N I M : E061191089

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 21 November 2023.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA



*[Handwritten signatures of Prof. H. Darwis, Atika Puspita Marzaman, Ishaq Rahman, Aswin Baharuddin, and Nurjannah Abdullah]*

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Andi Masty Kurniati Adha

NIM : E061191089

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**“PERAN FAO MENGATASI STUNTING MELALUI WORLD FOOD  
PROGRAMME (WFP) DI INDONESIA”**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi itu merupakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Januari 2024



Andi Masty Kurniati Adha

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan segala kemampuan yang terbaik penulis berikan hingga skripsi ini bisa selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dalam menjalani hidup ini.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan penelitian yang panjang dan penuh dedikasi, mulai dari pemilihan judul hingga proses penyusunannya secara akademik menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Peran FAO Mengatasi Stunting Melalui World Food Programme (WFP) di Indonesia”** sebagai sebuah landasan syarat proses kelulusan strata satu atau S1 pada program Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Penulis sangat menyadari jika skripsi ini terdapat banyak kekurangan yang tidak sesuai ekspektasi dari para pembaca, akan tetapi penulis telah memaksimalkan struktur, isi, substansi dan cara penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya skripsi. Oleh karena itu, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan

dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran FAO melalui World Food Programme dalam mengatasi stunting di Indonesia.

Sebagai penutupnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih lewat kata pengantar skripsi penulis kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam proses awal penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Makassar, hingga penulis dapat menyusun tugas akhir (skripsi) ini. Dan kepada pihak yang terlibat yaitu :

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan dan kasih sayang Allah, penulis tidak dapat sampai ke fase ini.
2. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri penulis sendiri, karena telah berjuang dan bertahan dengan segala macam cobaan dan badai yang datang menghampiri terutama saat fase menyusun skripsi ini. Sakit tips yang datang berkali-kali, minum obat dari profesional help dan segala cobaan disaat penulis lagi mentally break down tetapi dapat bertahan, disaat penulis sendiri tidak yakin dengan diri sendiri untuk menghadapi dan melewati cobaan unstable condition saat menyusun skripsi ini.
3. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar penulis, orang tua penulis, kaka penulis (Amirah & Wira) yang telah sabar dan tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis lahir batin sampai penulis dapat menyelesaikan studi S1 kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing penulis yaitu: 1. Prof. H. Darwis, MA,Ph.D dan ke-2 Aswin Baharuddin, S.IP, MA atas segala ilmu yang telah diberikan dari awal hingga akhir penulis menyusun skripsi ini. Arahan dan bimbingan yang sangat baik dan luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sangat berarti dalam hidup penulis.
5. Ucapan terimakasih kepada Andi Alim Fahri Amal kekasih penulis karena telah menemani dari awal hingga akhir penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala dukungan doa dan waktunya untuk selalu siap siaga menemani dan menolong disaat penulis lagi butuh bantuan dan support system.
6. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat atas support, dukungan doa dan hiburan untuk penulis disaat penulis lagi down. Terimakasih kepada Anggie, Reza, Sain, Kezia dan semua kerabat terdekat penulis yang tidak bisa di mention satu persatu, tanpa kalia penulis tidak dapat bertahan sampai sejauh ini. Dukungan emotional dan kasih sayang kalian memebuat penulis bertahan melewatinya, and i did it isn't?.
7. Last but not least, Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan kerabat jauh ataupun terdekat penulis yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat mention satu persatu, tapi tanpa dukungan kalian apalah daya penulis



menghadapi skripsi ini, Terimakasih banyak atas segala bantuannya.

Dari ucapan diatas untuk berbagai pihak yang sekali lagi penulis tidak bisa mention satu *persatu because there is no words can describe how much you guys mean to me. Since im as a student in Unhas University until now*, penulis bertemu dan berkenalan dengan banyak orang dari asal yang berbeda-beda, penulis mendapatkan ilmu dari guru-guru besar dan hebat terutama di Departemen HI. Segala moment, kisah, cerita haru dan seih yang tercipta tentang masa-masa perkuliahan penulis akan selalu terkenang dan tersimpan baik di ingatan dan hati penulis. Dan teruntuk orang tua penulis yang sejak awal berjuang sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin tercinta, mama dan papa kelulusan penulis adalah keberhasilan kalian sebagai orang tua yang hebat untuk penulis.

Akhir kata penulis berharap dari skripsi ini dapat digunakan oleh pembaca sebagaimana mestinya, dan informasi data kasus di skripsi penulis doaat dikembangkan seiring waktu berjalan.

Terimakasih

Makassar, 10 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM' with a circled 'A' and a flourish, with the name 'Nia' written below it.

Andi Masti Kurniati Adha

## ABSTRAK

Andi Masti Kurniati Adha, E061191089. In ‘ ‘ Peran FAO Mengatasi Krisis Stunting Melalui World Food Programme di Indonesia ‘ ‘, di bawah bimbingan Darwis selaku Pembimbing I dan Aswin Baharuddin selaku Pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran FAO dalam menangani krisis stunting melalui World Food Programme (WFP) di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasamanya bersama organisasi internasional dan bagaimana programnya bersama pemerintah Indonesia mengatasi stunting. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan (library research), data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif untuk memperoleh hasil yang bersifat deskriptif analitik.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dalam upaya mengatasi krisis stunting di Indonesia melalui World Food Programme (WFP) bersama pemerintah Indonesia sangat membantu satu sama lain. Ditemukan fakta bahwa wilayah-wilayah di Indonesia memiliki tingkat stunting yang tinggi berdasarkan fakta dan data yang ditemukan dalam penelitian ini. Dengan dampak yang berpotensi merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak, FAO bekerjasama dengan WFP telah berperan kunci dalam mengembangkan strategi yang berfokus pada pencegahan stunting melalui perbaikan gizi, terutama akses ke pangan yang berkualitas, serta peningkatan pemahaman masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya FAO dan WFP masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, dikarenakan permasalahan muncul dari pihak internal Indonesia sendiri.

Kata Kunci : Food Agriculture Organization, Krisis Stunting, Ketahanan Pangan, Indonesia

## ABSTRACT

*Andi Masty Kurniati Adha, E061191089. In "FAO's Role in Overcoming the Stunting Crisis Through the World Food Programme (WFP) in Indonesia", under the guidance of Darwis as Supervisor I and Aswin Baharuddin as Supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

*This research aims to determine the form of FAO's role in dealing with the stunting crisis through the World Food Program (WFP) in Indonesia and to find out how its collaboration with international organizations is implemented and how its programs with the Indonesian government address stunting. The research method in this paper uses library research, the data obtained is processed and analyzed qualitatively and supported by quantitative data to obtain analytical descriptive results.*

*Based on the results of this research, it was found that the role of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in efforts to overcome the stunting crisis in Indonesia through the World Food Program (WFP) together with the Indonesian government was very helpful to each other. It was found that regions in Indonesia have high levels of stunting based on the facts and data found in this research. With potentially detrimental impacts on children's growth and development, FAO in collaboration with WFP has played a key role in developing strategies that focus on preventing stunting through improving nutrition, especially access to quality food, as well as increasing public understanding. The findings of this research show that FAO and WFP efforts are still not enough to overcome the stunting problem in Indonesia, because the problem arises from within Indonesia itself.*

**Keywords:** *Food Agriculture Organization, Stunting Crisis, Food Security, Indonesia*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	25
D. Kerangka Konseptual.....	26
E. Metode Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Organisasi Internasional.....	34
B. Ketahanan Pangan ( <i>Food Security</i> ).....	41
C. Penelitian Terdahulu.....	52

BAB III GAMBARAN UMUM FAO DAN <i>WORLD FOOD PROGRAMME</i> DALAM MENGATASI STUNTING DI INDONESIA .....	55
A. Sejarah dan Profil <i>Food And Agriculture Organization</i> (FAO) .....	55
B. <i>WORLD FOOD PROGRAMME</i> (WFP) DAN PENANGANAN MASALAH PANGAN GLOBAL .....	68
C. Permasalahan Pangan dan Stunting di Indonesia .....	80
BAB IV ANALISIS PERAN FAO MENGATASI STUNTING MELALUI WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DI INDONESIA .....	102
A. Implementasi Kerjasama FAO dan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Stunting .....	102
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama FAO dengan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Stunting .....	118
BAB V PENUTUP .....	140
A. Kesimpulan .....	140
B. SARAN .....	144
DAFTAR PUSTAKA .....	146

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual Penelitian .....	12
Gambar 3.1 Struktur Badan Pengurus FAO .....	51
Gambar 3.2 Analisis Titik Panas Kelaparan (Oktober 2022 hingga Januari 2023) .....	55
Gambar 3.3 Data Jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan akut secara global pada tahun 2022 .....	58
Gambar 3.4 Kecamatan dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Jawa Barat .	74
Gambar 3.5 Peta di Kabupaten Manggarai Barat dengan Wilayah Stunting Tertinggi.....	78
Gambar 3.6 Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022 .....	78
Gambar 4.1 Skor Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI) Negara Asia Tenggara 2021-2022 .....	87
Gambar 4.2 Prevalensi Balita Stunting di Indonesia (2013-2024) .....	89
Gambar 4.3 Data stunting tahun 2021 sesuai hasil laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).....	103
Gambar 4.4 Angka stunting nasional tahun 2020 .....	104
Gambar 4.5 Data stunting 2021 menurun jadi 24,4% .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam praktek HI keanekaragaman bangsa dan negara merupakan hal yang rumit, karena didasarkan pada kepentingan negara dalam memenuhi kebutuhan internalnya. Dengan adanya keterbatasan yang dialami sebuah negara dengan negara lain, maka diperlukanlah interaksi dan kerjasama dengan sebuah organisasi internasional yang menjadi aktor dalam ilmu HI. Dalam menjalin sebuah kerjasama secara internasional para aktor memiliki tantangan tersendiri, dikarenakan hubungan yang terjalin didorong dengan tujuan yang telah disepakati bersama untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masing-masing negara.

Dari tahun ke tahun masalah dan kekhawatiran internasional tumbuh dan berubah sangat pesat, serta analisis dari HI telah terjadi pergeseran isu dimana tidak terbatas pada isu *high politics* saja tetapi isu kekuasaan, keamanan nasional, ekonomi dan politik negara telah meluas menjadi *low politic* seperti kemiskinan, hak asasi manusia (HAM), lingkungan, narkoba, kepadatan penduduk, ketahanan pangan dan kelaparan. Dalam menanggulangi isu-isu tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak karena menyangkut kehidupan banyak orang. Maka dari itulah persoalan internasional dari segi *low* dan *high* harus digarap secara kolaboratif bersama aktor yang terkait, dimana HI tentu saja tidak hanya dilakukan antara negara dengan negara namun bisa juga sebuah organisasi internasional dapat berperan dalam menyelesaikan segala isu internasional.

Salah satu isu politik yang menjadi sorotan juga perlu adanya perhatian dari dunia internasional yakni isu ketahanan pangan. Ketahanan pangan telah

menarik perhatian seluruh masyarakat internasional karena kenyataannya ketahanan pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap sebuah negara. Isu pangan juga adalah permasalahan ketahanan pangan yang menyebabkan gizi buruk kronis (stunting) akibat malnutrisi yang dampaknya mengganggu kestabilan pertumbuhan negara dari faktor ekonomi dan politik (Gustama, 2016).

Stunting adalah gangguan gizi kronis dimana tubuh gagal mencapai tinggi badan normal sesuai standar usia deviasi dunia kesehatan. *World Health Organization* (WHO) menginterpretasikan tingginya prevalensi pendek pada stunting menunjukkan akibat dari kekurangan asupan makanan yang bergizi dan suatu penyakit yang telah terinfeksi pada tubuh serta memerlukan waktu lama untuk pulih kembali. Stunting juga adalah bentuk ketidak cukupan nutrisi sejak kehamilan dari usia 24 minggu yang nantinya akan terjadi kegagalan pertumbuhan dari segi fisik dan otak pada bayi. Berdasarkan indeks tinggi badan umur menurut WHO, seorang anak terkena stunting dengan keadaan tidak terimbang dan kejar tumbuh tinggi badan anak melambat secara tidak normal. Periode 0-24 bulan dikenal sebagai masa periode emas pada cabang bayi yang sangat sensitif, dikarenakan akan mempengaruhi kualitas hidup yang konsokuensinya bagi anak tidak dapat diubah dan tidak dapat dikembalikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan nutrisi cukup pada anak di usia muda mereka sedini mungkin (Mitra, 2015). Kemiskinan suatu negara juga menjadi faktor pendukung seorang anak mengalami stunting, karena adanya gizi yang kurang mencukupi untuk masa pertumbuhannya. Dan juga menjadi masalah bagi sebuah keluarga yang tidak memiliki pengetahuan serta kondisi perekonomian yang cukup untuk bisa merawat seorang anak dengan baik untuk hidup sehat (Aridiyah, Rohmawati & Ririanty, 2015).



Pola asuh yang buruk dan kurangnya asupan makanan baik dari aspek kuantitas juga kualitasnya itu akan sangat berdampak secara tidak langsung pada tubuh anak dimasa perkembangannya nanti sehingga yang terjadi adalah kematian akibat kondisi gizi buruk kronis atau stunting (Aramico, Sudargo&Susilo, 2016).

Penting untuk diingat bahwa makanan adalah faktor terpenting yang dibutuhkan manusia dalam bertahan hidup, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dan baik adalah dengan makanan yang mengacu pada faktor ketahanan pangan serta kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh protein dan makanan dari segi kualitas yang baik. Beberapa penelitian di Indonesia ditemukan bahwa rumah tangga dengan ketahanan pangan yang buruk cenderung memiliki balita dengan gangguan gizi yang buruk. Tidak adanya asupan gizi juga energi yang memadai merupakan gangguan yang menyebabkan anak dibawah usia lima tahun bermasalah dalam perkembangan tinggi badan, karena kekurangan gizi untuk anak seusianya. Malnutrisi terjadi sejak bayi ada dalam kandungan, akan tetapi hingga bayi dilahirkan sampai berusia 2 tahun stunting baru nampak ke kondisi pada bentuk tubuhnya. Balita yang stunting atau stunting berat biasanya memiliki ukuran tinggi badan yang tidak proporsional sesuai dengan standar se-usianya jika dibandingkan standar dari WHO. Selain itu, ketahanan pangan akibat kekurangan gizi di usia muda meningkatkan kematian dan menyebabkan penderitanya mudah sakit, karena memiliki postur tubuh yang buruk saat dewasa nanti. Secara kemampuan kognitif bagi penderita gizi buruk juga akan terganggu kecerdasan dan kemampuan secara intelegensi, yang akan mengakibatkan dampak kerugian ekonomi jangka panjang bagi sebuah negara dengan SDM yang kurang memadai

(Sutarto, Mayasari & Indriyani, 2018).

Berbagai penelitian mengenai faktor juga risiko stunting sudah banyak dilaksanakan di Indonesia, seperti data yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa wilayah Asia Tenggara masih memiliki angka prevalensi stunting tertinggi sebanyak (31,9%) di dunia setelah Afrika (33,1%). Dan Indonesia menempati urutan keenam di kawasan Asia Tenggara setelah Bhutan, Timor-Leste, Maladewa, Bangladesh, dan India sebesar 36,4%. Tingginya stunting di Indonesia membuat Indonesia sedang berupaya mencapai pembangunan berkelanjutan kedua yang bertujuan memberantas kelaparan, serta mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik untuk mendukung pertanian berkelanjutan *atau Sustainable Development Goals* (SDG) yang diperkirakan akan mengurangi masalah stunting pada tahun 2025 mendatang (Anggraini, Siregar & Dewi, 2020).

Indonesia yang memang menjadi bagian dari kawasan Asia Tenggara masihlah terdapat situasi yang tidak lepas dari isu tersebut, maka prevalensi stunting di Indonesia juga cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan masyarakat untuk terus berkembang dan tumbuh bertahan hidup demi mencegah terjadinya stunting sangat memerlukan program kebijakan ketahanan pangan (Kemenkes RI. 2018). Seiring berkembangnya situasi dunia internasional, dikatakan bahwa membahas persoalan makanan tidak dapat dipisahkan dari membahas kebutuhan manusia di belahan dunia ini, dengan situasi pangan yang secara bertahap menjadi ancaman kelangkaan atau disebut sebagai krisis ketahanan pangan berhasil mengalihkan perhatian dunia dari isu perang dan konflik *atau high politic ke low politics*.

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa krisis pangan yang telah menjadi masalah politik tingkat tinggi di Indonesia dapat menjadi perhatian pihak internasional. Bagaimana tidak, soal pangan sudah sangat mendesak dan telah jadi perbincangan sejak tahun 1945 sampai menjelang berakhirnya Perang Dunia ke-II. Penyelesaian perjuangan yang berkecamuk di antara tiga benua, yakni Afrika, Asia, dan Eropa sngat penting untuk melakukan kerjasama dan berdiskusi antar aktor negara untuk menemukan solusi pada saat itu. Kebutuhan pangan meningkat dengan berjalannya waktu dan populasi dunia, sehingga setiap negara harus mampu menjaga ketersediaan pangan guna mencegah ancaman kelaparan dan kekurangan gizi kronis yang akan berdampak pada penduduknya (Mudrieq, 2015).

Organisasi internasional khususnya *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Food Programme* (WFP) telah memperhatikan adanya kesulitan yang ditimbulkan untuk memperoleh ketahanan pangan di banyak wilayah di dunia, termasuk Indonesia. FAO adalah organisasi khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berkomitmen untuk memberantas kelaparan yang melanda negara diseluruh dunia. Dalam menciptakan ketahanan pangan berarti menjamin masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang bergizi agar dapat hidup dengan baik, aktif, dan sehat. Lebih dari 194 anggota FAO dan WFP tersebar di berbagai negara untuk mampu bekerja secara global bersama dengan 130 negara di seluruh dunia.

*World Food Programme* atau (WFP) adalah organisasi antar pemerintah internasional di bawah naungan PBB dan mengatur segala faktor serta program yang berfokus ke pangan untuk membantu masalah kemanusiaan dunia. WFP juga didedikasikan memberantas kelaparan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang bertempat di kantor pusat *World Food Programme* yang berada di Roma dan Italia. Organisasi ini telah memiliki 80 kantor cabang tersebar di seluruh dunia, dan didirikan pada masa Presiden ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy. Terbentuknya WFP organisasi kemanusiaan terbesar dunia yang berkembang pesat tidak lepas dari peran penting direktur utama *Food For Peace* dalam menjalankan kewajibannya. WFP telah memberikan bantuan makanan kepada sekitar 80 juta orang di berbagai negara khususnya 75 negara setiap tahun. Bantuan pangan sangat penting bagi WFP untuk melaksanakan tugas kemanusiaannya, karena dirancang untuk memberikan kehidupan individu dan keluarga yang tidak mampu sehingga mereka dapat memproduksi dan mendapatkan pangan yang memadai dan berkualitas. *World Food Programme* juga mendistribusikan dan menawarkan bantuan kepada negara yang terkena dampak konflik karena mereka lebih cenderung memiliki permasalahan kesehatan akibat kekurangan gizi, sehingga WFP berhasil menerima hadiah nobel perdamaian pada tahun 2020 atas upayanya yang mengurangi korban kurang gizi dan membantu perdamaian di negara-negara yang terkena dampak konflik.

Pada tahun 2012 *World Food Programme* membantu 97 orang dengan jumlah terbesar di 88 negara, dan WFP secara resmi dibentuk sebagai inisiatif bersama PBB dan FAO dengan tujuan memberantas kelaparan dunia. Majelis umum PBB mendirikan WFP pada 24 November 1961 dengan Addeke Hendrik Boerma dari Belanda yang menjabat sebagai direktur eksekutif pertama dari Mei 1962 hingga Desember 1967. Dalam menjalankan programnya, FAO memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan melalui program bersama WFP dengan menyalurkan jatah makanan yang bergizi untuk menurunkan risiko kematian akibat malnutrisi seperti gizi buruk kronis atau stunting (Leonidhea, 2022).

Selanjutnya, sebagai hasil kerjasama yang telah terjalin antara organisasi internasional dengan Indonesia pada saat WFP dibentuk, Indonesia menjadi satu-satunya negara penerima bantuan pada saat kejadian tahun 1964 terjadi ledakan Gunung Agung di Bali, Indonesia menerima bantuan makanan sebesar \$1 juta. WFP telah berada di Indonesia selama kurang lebih lima puluh tahun sejak 1964 hingga 2014 dan masih berlanjut. Akan tetapi, WFP sempat menghentikan aktivitasnya di Indonesia pada tahun 1996 saat Indonesia berada di ambang swasembada pangan. Namun, *World Food Programme* kembali ke Indonesia pada tahun 1998 dan memberikan subsidi beras kepada masyarakat yang rentan dan terkena dampak permasalahan gizi pada bulan-bulan setelah peristiwa *El*

*Nino* dan krisis keuangan Asia dalam bencana alam seperti tsunami Aceh tahun 2004. *World Food Programme* telah beroperasi sejak tahun 1998, dan WFP telah membantu hampir 20 juta orang Indonesia yang rawan ketahanan pangan terutama di daerah yang terkena bencana alam dan ketidak stabilan ekonomi (World Food Programme, 2013).

Akibatnya, FAO harus terus merespon keadaan darurat di berbagai wilayah dunia khususnya di Indonesia. Dikarenakan FAO dan WFP sebagai organisasi kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang menderita gizi kronis akibat kelaparan, menjadi tanggung jawab bagi FAO untuk berusaha mencegah krisis kelaparan di masa depan, FAO menyelenggarakannya melalui *World Food Programme* yang menggunakan makanan sebagai aset dan menyebarkan pengetahuan bagaimana menjaga nutrisi agar menciptakan masyarakat dinamis. Hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya pangan dalam kehidupan, sehingga pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa semua penduduk mendapatkan gizi yang cukup untuk hidup sehat dan produktif (FAO, 2017).

Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran terkait segala instrumen yang di paparkan penulis di atas untuk menjadi sebuah judul penelitian membuat penulis tertarik meneliti penelitian ini dengan judul “Peran FAO Dalam Mengatasi Stunting Melalui *World Food Programme* (WFP) di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kerjasama dalam dunia internasional tidak akan membiarkan negara Indonesia menderita akibat isu kelaparan yang hampir terjadi di setiap pelosok

wilayahnya. Dari pemerintah dunia sebagai aktor dan lembaga organisasi internasional, semua pihak bekerjasama untuk mengakhiri krisis pangan yang merupakan penyebab utama dari stunting sebagai gizi buruk kronis (Sunny Bhatt, 2014). WFP dan FAO adalah aktor nonnegara yang diselidiki dalam penelitian ini, sebagai organisasi internasional *World Food Programme* FAO dan WFP akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk membantu populasi yang rentan dalam meningkatkan ketahanan dan WFP akan terus mengalokasikan pengawasan ketahanan pangan diseluruh dunia terkhususnya kepada Indonesia.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, Penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana kerjasama sebuah organisasi internasional dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi stunting di Indonesia melalui program dan peranan dari organisasi international.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ditujukan pada :

1. Bagaimana implementasi peran FAO dan pemerintah dalam penanganan stunting di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kerjasama FAO dengan pemerintah Indonesia dalam penanganan stunting?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan pemahaman serta pengembangan di bidang ilmu pengetahuan terkhususnya pada ilmu hubungan internasional, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama FAO dan pemerintah Indonesia dalam penanganan stunting.
2. Untuk memahami faktor apa saja yang membahas dan menghambat implementasi kerjasama FAO dengan pemerintah Indonesia dalam penanganan stunting.

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan penulis dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penulis dan pembaca manfaat akademis dan pemahaman tentang bagaimana sebuah organisasi internasional menangani epidemi stunting di Indonesia.
2. Memberikan manfaat akademik beserta pengetahuan tentang stunting dan kondisinya di Indonesia kepada penulis dan pembaca.
3. Manfaat penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi ilmu pada studi Ilmu hubungan internasional, terkhususnya pada bidang kerjasama organisasi internasional.

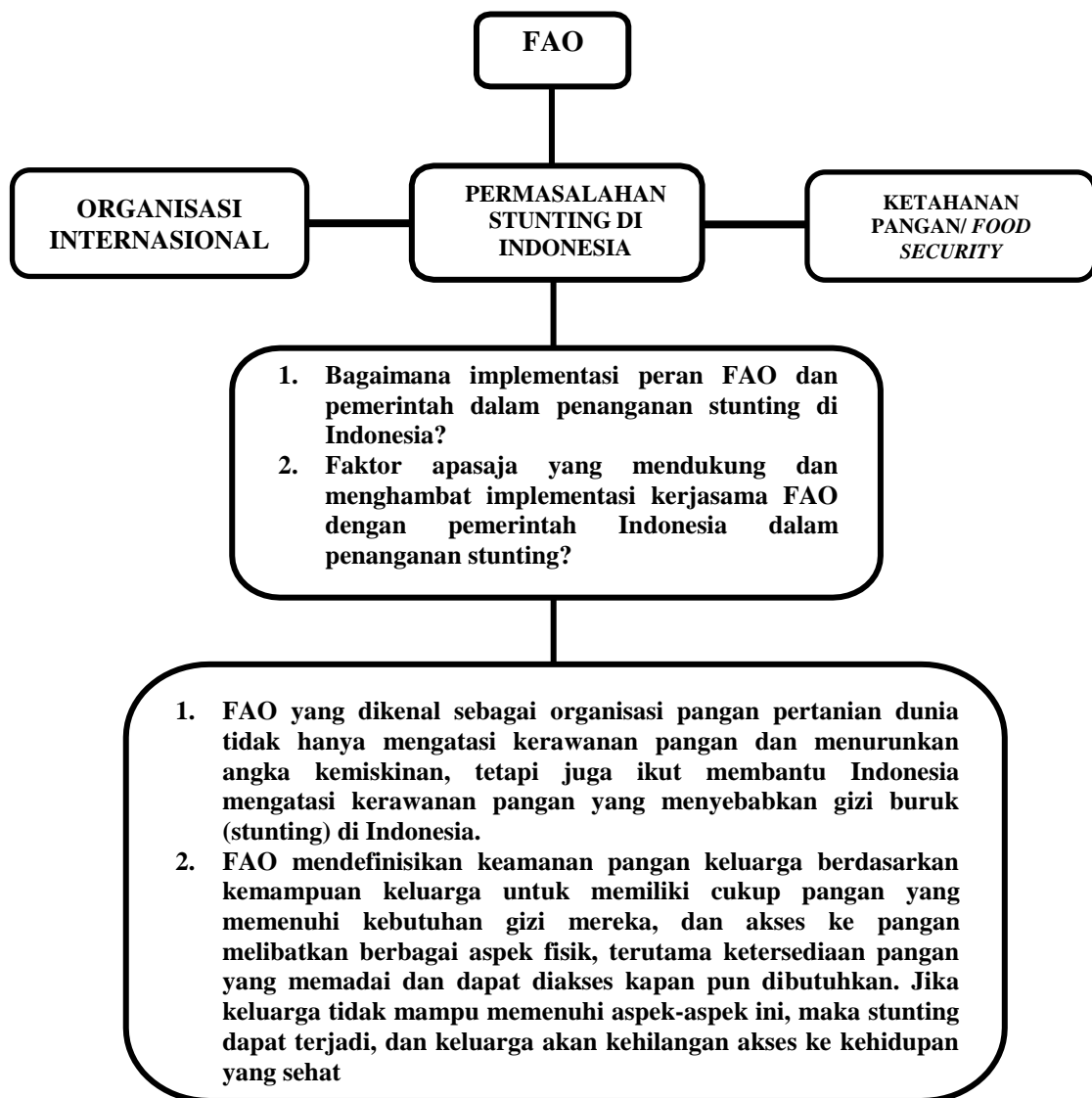
#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka kajian ini tersusun dari sebuah konsep yang tertata paradigmanya serta pandangan dari para ahli dengan teori-teori yang jika disarikan akan menyerupai piramida terbalik. Selanjutnya, gagasan dan panduan yang membentuk rujukan untuk proposal ini akan diuji validitasnya melalui sebuah penelitian.

Terdapat hubungan interaksi antar aktor internasional dalam disiplin



ilmu HI yang terdiri dari Individu, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Pemerintah juga dapat dianggap sebagai aktor dengan mengutip teori serta pendapat para ahli yang dimana memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian dan dapat mendukung analisa dalam menyelesaikan penelitian penulis. Berikut ini skema kerangka konseptual penulis:



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual Penelitian**

*Sumber: Di olah oleh penulis*

## 1. Organisasi Internasional

Pembahasan pada bagian penyusunan kerangka kajian ini terdiri dari konsep-konsep yang tertata yaitu, paradigma, pandangan ahli, dan teori-teori yang jika disarikan akan tampak seperti piramida terbalik. Selanjutnya, gagasan dan ketentuan tersebut membentuk fundamen bagi proposal yang akan diteliti.

Dalam ilmu HI terdapat hubungan interaksi antar aktor internasional. Aktor-aktor ini dapat berupa individual, perusahaan multinasional, atau sebuah organisasi internasional, serta pemerintah. Oleh karena itu, pada bagian kerangka konseptual penelitian ini juga akan menguraikan pengertian organisasi internasional dan ketahanan pangan sebagai kerangka teoritis yang akan digunakan untuk membahas masalah yang dikaji pada penelitian ini. Dengan mengutip teori serta pendapat para ahli yang dimana memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini dan dapat mendukung analisa dalam menyelesaikan penelitian penulis. Hans Kelsen mendefinisikan organisasi internasional bagai berikut:

“Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh suatu perjanjian internasional di antara negara-negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu Kelsen, H. (1966).”

Dalam hal ini, pembentukan organisasi internasional bertujuan agar negara dapat mengidentifikasi sejumlah masalah yang tidak bisa di selesaikan sepihak. Hal ini kemudian menuntut negara agar bisa berkoordinasi dan bekerjasama guna bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah dengan melalui kerjasama organisasi internasional. FAO sebagai organisasi internasional yang dibentuk atas persetujuan secara internasional antar negara, yang konsep organisasinya untuk

mencapai tujuan tertentu berada dibawah naungan PBB dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian secara global untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dunia. Leroy Bennett mempresentasikan konsepnya tentang organisasi internasional dalam bukunya tentang *International Organization, Principles and Issues*, yaitu :

“Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana kerjasama antar negara, yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Organisasi internasional juga harus mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, guna mempermudah akomodasi terutama ketika muncul suatu masalah Bennet A, Lerroy (1991).”

Sarana kerjasama dalam kegiatan organisasi internasional dalam penyelenggaraannya juga tergolong dari 2 jenis, yaitu organisasi antar pemerintah internasional (*Inter Governmental Organizations*) atau disebut juga sebagai IGO, dan organisasi non pemerintah internasional (*International Non Government Organizations*) juga dikenal sebagai INGO. FAO dan WFP adalah organisasi pemerintah internasional (IGO) yang berdasar karena menurut strukturnya WFP adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dibatasi oleh pemerintah mana pun. Menurut kedua filosof di atas, penelitian ini lebih mirip dengan penjabaran konsep Teuku May yang mengatakan

“Organisasi Inetrnasional memiliki pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, sama dengan cara kerja dari FAO dan WFP yang juga bekerja melintas batas-batas negara Rudy (1993).”

Teuku May (1993) juga menyatakan bahwa upaya untuk mencapai.tujuan. organisasi internasional akan mencakup pembentukan perjanjian antara pemerintah dan pemerintah, serta pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Haltersebut juga terkait dengan pendekatan kerja WFP, yang dimana WFP mengambil sumbangan material dari negara lain bahkan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat khususnya FAO

karena keduanya merupakan organisasi internasional yang melakukan aksi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan suatu negara (Hartadi, 2016). Organisasi internasional memiliki tugas dan peran yang seharusnya membantu dalam mengatur tatanan internasional. Peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kelompok menurut Archer :

1. Sebagai Instrumen : negara anggota menggunakan organisasi internasional untuk mencapai tujuan berdasarkan kebijakan luar negeri mereka.
2. Sebagai forum : Organisasi internasional berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggotanya untuk berkumpul dan memperdebatkan isu-isu yang mereka hadapi. Beberapa negara sering menggunakan organisasi internasional untuk membawa masalah domestik negara lain menjadi perhatian komunitas internasional.
3. Sebagai aktor independen : Organisasi internasional juga dapat mengambil kehendaknya sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuatan atau paksaan dari luar.

Selanjutnya, tinjauan kebijakan dalam organisasi internasional mengungkapkan berbagai fungsi sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator, dan determinan (Banyu Perwita, Yanyan Mochammad, 2015). Apa yang telah dilakukan FAO dan WFP untuk membantu negara-negara yang mengalami kesulitan serta sebagai contoh peran dalam implementasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi internasional. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa penelitian ini akan secara efektif menggambarkan organisasi internasional

sebagai kerangka kerja konseptual.

**a. Ketahanan Pangan / *Food Security***

Kehadiran pertama konsep ketahanan pangan yaitu pada tahun 1974 atau tepatnya pada *World Food Conference*. Konsep ketahanan pangan sebenarnya masuk dalam pembahasan *human security* yang dimana fokus masalah keamanan kemudian beralih ke masalah yang seringnya menimpa manusia secara individual. Istilah ketahanan pangan dalam *World Food Conference* 1974, lebih banyak merujuk terhadap masalah kekurangan pangan yang terjadi secara global atau dalam level dunia.

Membahas soal bagaimana pasokan bahan makanan bagi pertumbuhan masyarakat yang terus meningkat, membuat ketahanan pangan didefinisikan sebagai sebuah bentuk ketersediaan pasokan bahan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Pada tingkat nasional, semua negara harus memastikan dengan baik bahwa pasokan makanan bagi negara mereka dapat terpenuhi. Surplusnya bahan makanan dalam suatu negara juga tidak mengindikasikan bahwa negara tersebut terjamin dalam masalah ketahanan pangan. Permasalahan utama dalam ketahanan pangan adalah bukan hanya berada pada titik ketersediaan pasokan bahan makanan yang cukup dalam negara. Akan tetapi, lebih merujuk kepada persoalan distribusi dan akses yang bisa dijangkau oleh masyarakat negara. Dengan persediaan makanan yang cukup tidak menjamin masyarakat tidak akan terdampak kelaparan dan malnutrisi akibat gizi buruk kronis (Maletta, 2014).

Bahkan menurut FAO, dalam menjamin ketahanan pangan dalam suatu negara adalah dengan memastikan bahwa semua orang dalam sepanjang masa masih memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap bahan makanan yang

mereka butuhkan sehari-hari (Maletta, 2014). Perubahan definisi ketahanan pangan terus terjadi dan definisi yang banyak digunakan saat ini merujuk terhadap 1996 *Summit's Plan of Action* (WFS 1996). Menurut WFS 1996, ketahanan pangan dapat dicapai apabila semua orang sepanjang waktu secara fisik dan ekonomi dapat mengakses makanan yang aman dan bernutrisi untuk memenuhi kebutuhan diet maupun preferensi untuk hidup aktif dan sehat. Dengan demikian, ada empat pilar utama dalam mencapai ketahanan pangan yaitu, ketersediaan makanan, akses terhadap makanan (secara fisik dan ekonomi), manfaat biologis makanan bagi tubuh manusia, dan stabilitas dalam hal ketersediaan akses dan manfaat makanan (Maletta, 2014). Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan konsep ketahanan pangan yang mengacu pada definisi yang dibuat dalam *World Food Summit 1996*.

Penulis menggunakan desain studi deskriptif di mana penulis menguraikan bagaimana menerapkan gagasan teoretis organisasi Internasional FAO dan WFP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang akan menonjolkan pengungkapan dan penjelasan berbagai variabel yang terkait dengan topik penelitian ini dan yang mengacu pada data yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode campuran yaitu pendekatan kualitatif. Kualitatif digunakan sebagai analisis deskriptif terhadap peranan FAO dalam mengatasi stunting melalui *world food programme* di Indonesia melalui data dan informasi yang akan diperoleh dari berbagai sumber yang tepat dan sesuai.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari literatur dan media internet melalui situs-situs relevan yang terhubung dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bertumpu pada penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku dan media online melalui website terpercaya, serta hasil penelitian yang ilmiah.

## **3. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metodologi nonstatistik yang dimana sebuah penelitian bertujuan untuk mengungkap suatu fenomena dengan cara memecah data menjadi frase-frase kalimat dari angka, tabel, grafik, dan diagram.

## **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena atau peristiwa secara rinci dan terperinci. Dalam konteks penelitian metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang karakteristik atau sifat suatu populasi atau sampel yang menjadi objek penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional merupakan sebuah organisasi yang tidak hanya sekedar melintasi batas-batasan negara, tetapi mempunyai kegiatan diberbagai negara. Dalam arti, sebagai lembaga-lembaga politik sekaligus lembaga hukum (*legal institution*) dalam masyarakat internasional. Organisasi internasional juga beroperasi setiap hari dimasing-masing wilayah nasional negara dan setiap anggota negara berhadapan dan berhubungan dengan hukum nasional negara. Organisasi internasional dibentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan kerjasama antar negara dan ketergantungan pada orang lain untuk tumbuh secara bertahap selama kesempatan perkembangan sosial, dan hal tersebut berlaku untuk masyarakat domestik maupu lembaga internasional. Masalah yang sering terjadi dan membutuhkan aktivitas kolaboratif pertama kali dirasakan di ranah non-politik. Tujuan dibentuknya organisasi internasional pada awalnya adalah untuk mendukung hal-hal berupa kerjasama pada masa revolusi industri. Dalam organisasi internasional, aksesori dasar hukumnya adalah masyarakat internasional, karena subyek hukum internasional adalah masyarakat internasional, maka hukum internasional bekerja dengan cara mengikat suatu organisasi internasional dengan mengadakan forum diskusi yang menyatukan semua wilayah negara internasional adalah organisasi internasional, yang dibentuk sebagai produk dan layanan hukum secara internasional



Oleh sebab itu, Organisasi internasional pasti akan melahirkan kerja sama antar negara begitu pula dengan membentuk suatu organisasi internasional yang bisa membuat banyak kontribusi serta mensejahterakan rakyat masing-masing (Perwita, 2011).

Seiring berjalannya waktu, studi hubungan internasional tidak hanya fokus pada negara sebagai aktor utama dalam politik internasional, tetapi negara dipandang sebagai aktor satu-satunya yang memiliki kekuatan dalam bidang militer dan ekonomi. Sedangkan aktor non-negara dianggap tidak memiliki kekuatan dan kontribusi dalam politik internasional. Perubahan dalam kerjasama internasional pun terjadi dalam dunia HI yang dimana keberadaan organisasi internasional dalam percaturan politik global mulai mendapat perhatian ilmuwan politik. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah dan keaktifan organisasi internasional dalam merespon isu global sejak tahun 1945. Bertambahnya jumlah organisasi internasional menunjukkan adanya peningkatan interdependensi antar negara. Dimana, negara mulai sadar pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi berbagai isu global seperti krisis ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kesenjangan pembangunan, kesehatan dan kerusakan lingkungan (Heywood, 2011, hlm. 432-433). Penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh tokoh hukum internasional terkait organisasi internasional oleh Gerbet 1977: 7 dalam buku Clive Archer yang berjudul '*International Organization*' mengatakan " Organisasi Internasional adalah hasil dari upaya untuk menertibkan hubungan internasional dengan membangun ikatan yang langgeng lintas batas antara pemerintah atau kelompok sosial yang ingin mempertahankan kepentingan bersama, dalam konteks badan permanen, yang berbeda dari lembaga nasional, serta memiliki karakteristik individu sendiri dan mampu mengekspresikan

keinginan mereka sendiri dan yang berperan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu secara internasional ‘’ (Archer, 2001). Berbeda lagi dengan Kant & Jean Jacques Rousseau, yang mengartikan organisasi internasional sebagai berikut:

“Republik adalah sumber perdamaian. Hubungan antarnegara adalah analogi bagi hubungan antar-individu dalam kondisi lingkungan yang imajiner. Negara-negara dapat menghindari anarki dengan memperbaiki kondisi internal untuk memungkinkan ‘kekuasaan yang tahan lama’ dan bersatu secara sukarela ke dalam sebuah Organisasi Internasional (Rafferty, 2021, hal. 29)”

Cliver mengakui di dalam bukunya yang berjudul ‘*International Organization*’ menjelaskan secara ringkas bahwa:

“Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal yang berkesinambungan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota (pemerintah dan/non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama ‘’ (Archer, 2001).”

Sama seperti yang dimaksud oleh Andrew Heywood, ahli yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai institusi dengan prosedur formal dan keanggotaannya terdiri dari tiga atau lebih negara (Heywood, 2011). Dan dari implementasi Cliver dan Andrew mengarah kepada Samuel Barkin dalam bukunya mendefinisikan organisasi internasional itu sebagai organisasi antar-pemerintahan (*intergovernmental organization*) yang inklusif. Dimana, organisasi internasional terbentuk dari perjanjian antar negara dan keanggotaannya terbuka bagi semua negara dunia yang tertarik untuk ikut (Barkin, 2006, hal. 1). Pada hakikatnya, peran utama organisasi internasional menunjukkan bahwa organisasi-organisasi internasional dan hubungan internasional sangat penting untuk mencapai kepentingan nasional dan masalah global yang belum terpecahkan selama proses globalisasi yang cepat. Masalah yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, hak asasi manusia, perdagangan manusia, dan

sebagainya tidak dapat diatasi hanya oleh peran pemerintah saja, melainkan memerlukan kerja sama dari berbagai kelompok melalui organisasi internasional.

Tidak peduli model kerja sama apa yang melibatkan lintas batas negara, hal itu bergantung pada struktur organisasi yang jelas dan komprehensif. Dan diharapkan atau dimaksudkan untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara berkelanjutan dan bersifat institusional guna mencapai tujuan yang diperlukan, dan ini diterima oleh semua pihak, baik di antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Organisasi-organisasi dalam kerangka ini memiliki tujuan bersama dengan organisasi internasional (Rudy, 2005).

Oleh karena itu, suatu organisasi internasional perlu mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;
2. Baik kerjasama yang ruang lingkungannya melintasi batas negara
3. Serta antara pemerintah atau non-pemerintah
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap

Beberapa syarat utama dalam membentuk suatu organisasi internasional antara lain:

1. Tujuan harus benar-benar internasional dengan maksud untuk mencakup setidaknya terdiri dari tiga negara bagian untuk mencapai kepentingan bersama.
2. Keanggotan harus merupakan partisipasi individu atau kolektif, dengan hak suara penuh, dari setidaknya tiga negara bagian dan harus terbuka untuk setiap

individu atau entitas yang memiliki kualifikasi yang sesuai di area organisasi.

3. Harus ada kontribusi besar untuk anggaran dari setidaknya tiga negara bagian dan tidak boleh ada upaya untuk menghasilkan keuntungan untuk dibagikan kepada anggota.
4. Organisasi internasional wajib memiliki karakteristik yang sesuai dengan hukum internasional
5. Pencapaian tujuan tersebut mencerminkan adanya partisipan keterlibatan dari setiap anggota negara.

Organisasi internasional dikategorikan berdasarkan anggota, tujuan, kegiatan, dan struktur yang mereka miliki. Organisasi internasional yang didasarkan pada status anggota dapat dikategorikan lebih lanjut berdasarkan jenis anggota atau tingkat keanggotaan. Dilihat dari jenis anggotanya, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua jenis: organisasi yang diwakili oleh pemerintah negara bagian sebagai anggota atau *IGOs (International Governmental Organizations)*, dan organisasi yang beranggotakan bukan berbasis pemerintah atau berbasis LSM yaitu *Non-Governmental Organizations*. Kategorisasi internasional INGO dan IGO adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional Antar-pemerintah (*Inter-Governmental Organization*) yang disingkat IGO. Anggotanya adalah lembaga pemerintah atau perseorangan yang menjadi wakil resmi pemerintah di negara tersebut. Kegiatan administratif diatur oleh hukum publik. IGO (*International Government Organization*) merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat, meskipun anggotanya sebagian besar adalah negara, namun IGO tidak memasukkan badan negara sebagai

anggotanya dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap negara mempunyai agenda masing-masing yang mungkin tidak sejalan dengan agenda organisasi. Oleh karena itu, IGO merupakan negara yang masuk dalam kategori organisasi internasional, namun terdiri dari beberapa kelompok, seperti ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi lainnya.

2. Organisasi Non-Pemerintah Internasional (*Non-Governmental Organization*) yang biasa disingkat LSM. Alternatifnya, kata INGO digunakan untuk membedakan antara organisasi non-pemerintah internasional dan organisasi non-pemerintah nasional (keduanya dalam lingkup internal). INGO biasanya adalah organisasi yang mengkhususkan diri pada olahraga, agama, budaya, dan seni. Upaya administratif mereka difasilitasi oleh hukum perdata, termasuk WWF, *Greenpeace*, Palang Merah Internasional, dan organisasi lainnya. Mereka tidak jauh berbeda dengan IGS dan INGS, yang membedakan hanyalah penempatannya di dalam negeri dan cara mereka mewakili negara. (May Rudy, 2005, hlm. 5).

Sejarah munculnya istilah *Non Governmental Organization* atau NGO, muncul pada tahun 1945 karena usulan PBB untuk membedakan partisipan dalam charternya antara hak partisipasi untuk badan khusus antar pemerintah dan orang-orang untuk organisasi swasta internasional. Di PBB, hampir semua jenis individu dapat diakui sebagai NGO, mereka hanya perlu menjadi badan independen dari kontrol pemerintah, tidak berusaha untuk menantang pemerintah baik sebagai partai politik atau dengan fokus yang lebih spesifik lainnya. NGO memang mandiri, ketika mereka merancang program mereka sendiri, tetapi pengaruh pemerintah dapat timbul secara tidak langsung jika sebuah program NGO dirancang khusus

untuk membuatnya lebih mungkin berjalan dengan bantuan atau kontrak dengan pemerintah. Struktur NGO bervariasi, bisa dalam bentuk hirarki global dengan otoritas pusat yang relatif kuat atau pengaturan federal yang lebih longgar. Atau berbasis di satu negara dan beroperasi lintas bangsa. Pada hakikatnya NGO adalah komponen dari sebuah gerakan sosial (Pease, 2000. Hal. 276).

Eksistensi di hampir seluruh negara, NGO lebih dari kelompok yang memiliki pengaruh dalam politik domestik, maka mereka memiliki peran di dalam politik global, sekalipun terlibat dengan isu yang merupakan kepentingan global atau bagian dari jaringan global organisasi berbasis lokal yang berkampanye mengenai isu-isu penting secara global (Elias & Sutch, 2007, Hal.89). Sebagian NGO di dani sepenuhnya oleh sumber private, sebagian yang lain mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kampanye anti perbudakan merupakan salah satu gerakan lintas negara pertama yang dimotori oleh NGO. Mulai dari 1800-an NGO juga berperan aktif dalam kampanye penggunaan metode non-kekerasan untuk menyelesaikan sengketa negara. Peran NGO makin meningkat pada tahun 1970-an dan 1990-an dan secara efektif mobilisasi massa untuk mempengaruhi pengambilan keputusan internasional. Momentum peran NGO dalam hubungan internasional terjadi pada *United Nations Conference on the Environment and Development* (UNCTAD) tahun 1992. Situasi tersebut membuat organisasi internasional terkhususnya NGO memiliki kesempatan untuk masuk dan memberikan kontribusi sejak tahun 1970-an metode konferensi internasional banyak diterapkan untuk membahas isu lingkungan, kependudukan, perempuan dan isu pangan.

Dengan demikian, seiring dengan dinamika dunia yang terus berubah, teori organisasi internasional tetap menjadi alat penting dalam merespons perubahan dan menghadapi tantangan masa depan. Dengan terus mengembangkan dan menguji teori ini berdasarkan pengalaman empiris dan kenyataan yang ada, kita dapat memperkuat kerjasama dan pembangunan global untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Serta, membuka jendela luas bagi pemahaman tentang kompleksitas interaksi global dan dinamika hubungan antarnegara untuk dapat memahami bagaimana organisasi internasional berperan dalam menciptakan kerjasama, mengatasi konflik, dan mempromosikan perdamaian serta pembangunan global. Dengan upaya kolaboratif yang terus menerus, diharapkan teori organisasi internasional akan terus berkembang dan berkontribusi positif bagi dunia yang semakin saling terhubung dan saling mempengaruhi.

### **B. Ketahanan Pangan (*Food Security*)**

Ketahanan pangan menjadi isu kritis dalam lingkup permasalahan internasional karena mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan ketimpangan sosial, akses terhadap pangan yang mencukupi dan berkualitas menjadi hal yang mendesak bagi banyak negara. Ketahanan pangan atau (*food security*) secara harfiah berarti menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses terhadap pangan dan akses yang sama terhadap hidup sehat (Suhardjo, 1996). Meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga merupakan isu yang sangat penting bagi jutaan orang di seluruh dunia yang terus menderita kelaparan dan kekurangan gizi, dan bagi mereka yang hidupnya terancam di masa





depan, terutama bagi generasi mendatang. Mencapai pasokan makanan yang cukup agar kebutuhan nutrisi terpenuhi adalah bagian dari ketahanan pangan berkelanjutan yaitu, mengimbangi kebutuhan pangan yang terus menerus meningkat dan menjadi tantangan global. Promosi pertumbuhan pertanian dan hasil panen, khususnya harus tetap tinggi dalam bidang perekonomian negara.

Banyak negara berkembang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan mereka, tetapi menghadapi kendala sumber daya dan anggaran biaya. Biasanya negara-negara berkembang tersebut sangat bergantung pada sejumlah kecil instrumen kebijakan seperti penjatahan pangan, subsidi harga umum, program ketenagakerjaan atau skema pemberian makan bagi masyarakat yang kurang mampu. Instrumen kebijakan keamanan pangan yang tidak selaras dengan sifat spesifik dari masalah ketahanan pangan suatu negara menyebabkan banyak negara berprestasi rendah dalam transisi dari kebijakan pangan yang direncanakan berorientasi pasar ke seluruh jajaran instrumen konteks kebijakan ekonomi baru. Ketahanan pangan pada dasarnya didefinisikan sebagai kebutuhan pangan makanan dan nutrisi yang dapat diakses oleh semua orang agar hidup sehat. Konsep ketahanan pangan mengatasi risiko orang-orang agar tidak kesulitan terhadap makanan yang dibutuhkannya, dan risiko ini berhubungan dengan produksi pertanian, pekerjaan dan pendapatan. Dengan demikian ketahanan pangan adalah kemampuan untuk mengamankan makanan yang cukup untuk memastikan asupan makanan yang memadai bagi semua orang. Secara teori ada dua jenis permasalahan ketahanan pangan yaitu dalam sebuah rumah tangga dan bagi masyarakat miskin, dan dibedakan karena kenyataannya kedua aspek tersebut berkaitan satu sama lain. Biasanya, orang miskin yang secara

kronis tidak aman pangan dan paling terpuak oleh masalah kerawanan pangan sementara. Berbagai dimensi kerawanan pangan menunjukkan bahwa tidak ada indikator pasti untuk mengukurnya. Keamanan pangan global, regional dan nasional dapat dipantau dalam permintaan pangan, penawaran, dan indikator stok perdagangan. Pemantauan ketahanan pangan dalam rumah tangga membutuhkan informasi dalam pemenuhan nutrisi sehari-hari agar dapat memiliki kualitas hidup yang sehat. Sosial ekonomi, demografi dan variabel nutrisi seperti tingkat upah dan pendapatan, pekerjaan ketika dianalisis secara proporsional dapat melengkapi program dan kegiatan yang memantau perubahan dalam ketahanan pangan yang baik. Dikarenakan Akses pada makanan sehat dan bernutrisi dalam ketersediaan sehari-hari adalah penentu penting dari ketahanan pangan (Pandya-Lorch, 1992. Hal. 1).

Di karenakan dalam kebijakan ketahanan pangan adalah menyediakan asupan makanan yang memadai bagi individu-individu, melalui ketersediaan dan aksesibilitas makanan merupakan kondisi yang diperlukan untuk kesejahteraan nutrisi. Dan untuk, memperbaiki situasi ketahanan pangan lebih spesifik dari masalah ketahanan pangan penduduk, harus dipahami dengan baik agar dapat membangun kapasitas pemantauan dan analitis untuk mendapatkan pemahaman penting dalam pemenuhan nutrisi yang baik adalah bagian dari kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat ditingkatkan dalam jangka pendek dan panjang melalui berbagai cara. Perekonomian fiskal dan strategi dan kebijakan program yang alternatif harus menjadi kriteria penting untuk mengambil keputusan. Terlepas dari strategi yang dirancang khusus untuk memperbaiki kerawanan pangan bagi kebijakan ekonomi makro, dan sektoral telah

dimaksudkan kedalam efek ketahanan pangan yang tidak diinginkan dan perlu dipahami serta dipertimbangkan. Peran yang tepat dari negara, pemerintah lokal dan masyarakat dan aktor publik lainnya seperti organisasi internasional khusus, perlu bekerja sama untuk mencapai permasalahan keamanan pangan rumah tangga agar dapat diidentifikasi. Adanya pemahaman tentang kebutuhan nutrisi dan perkembangan sektor pertanian diperlukan untuk diidentifikasi agar mendapatkan strategi bantuan internasional yang efektif untuk ketahanan pangan. Dimulai dari, mengidentifikasi makanan yang sehat dan bernutrisi untuk dikonsumsi, memberikan edukasi tentang pentingnya mengonsumsi makanan empat sehat lima sempurna agar kebutuhan nutrisi bagi tubuh dapat dipenuhi dari orang-orang yang kurang literasi akan hal tersebut, terkhususnya dalam konteks masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi indikasi permasalahan ketahanan pangan yang perlu diidentifikasi lebih lanjut (Pandya-Lorch, 1992. Hal. 2).

Dalam menciptakan ketahanan pangan yang baik, dan pertumbuhan masyarakat negara yang sehat juga membutuhkan pembangunan berkelanjutan yang terkait dalam pemenuhan kebutuhan pangan, meskipun dalam prosesnya merupakan beban bagi sebagian besar negara di dunia (Gaarbero, Jackering, 2021). Pada tahun 2019, mencapai sekitar 820 juta bahkan lebih orang di dunia masih merasakan kelaparan, dengan setiap satu dari sembilan orang tidur dalam kondisi kelaparan (FAO et al, 2019). Kondisi ini menyebabkan hambatan yang signifikan untuk mencapai tujuan nol kelaparan bagi sebuah negara di dunia (Tora et al., 2021). Nol kelaparan yang merupakan tujuan utama kedua dari pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan tujuan lain, seperti konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengurangan ketidaksetaraan ekonomi untuk mencegah kemiskinan (Yulianti, Ratnasari, 2020).

Selain itu, ada banyak aspek terkait dengan konsep keamanan pangan, tetapi aspek yang paling khusus dalam konsep ini adalah aspek ekonomi. Konsep keamanan pangan selalu dimulai dengan kemampuan masyarakat atau individu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan harga yang terjangkau, yang berlaku untuk masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk yang lebih tinggi, menengah, dan terutama lapisan sosial yang lebih rendah.(Rachman & Ariani, Mewa, 2002). Konsep ketahanan pangan juga membahas risiko seseorang tidak memiliki akses ke makanan yang dibutuhkan, risiko-risiko tersebut dapat timbul dari pendapatan atau produksi pangan, misalnya dalam situasi ‘normal’ tanpa krisis seperti perang atau guncangan perubahan kenaikan harga pangan yang menyebabkan risiko tinggi bagi rumah tangga menyebabkan asupan makanan tidak memadai. Faktor-faktor seperti lingkungan kesehatan dan sanitasi, kapasitas rumah tangga tidak dapat merawat anggota keluarganya dengan baik juga menjadi faktor permasalahan terjadinya gizi buruk akibat permasalahan ketahanan pangan. Seperti yang dikatakan Maxwell dalam buku *‘Improving Food Security Of The Poor’* by Joachim Von Braun, Howarth E. Bouis, Shubi K. Kumar and Rajul Pandya-Lorch, Maxwell menjelaskan ‘Risiko kerawanan pangan penentu penting ketahanan pangan dalam rumah tangga ada 2 hal, yaitu:

1. Tidak memastikan kecukupan nutrisi dalam kehidupan sehari-hari
2. Tidak memiliki akses kepada makanan yang sehat dan bernutrisi dalam rumah tangga.

Yang secara teori, dua jenis kerawanan pangan rumah tangga kronis dan sementara dapat dibedakan, tetapi pada kenyataannya mereka saling berkaitan. Kerawanan pangan kronis adalah pola makan yang terus-menerus tidak memadai

karena disebabkan oleh ketidak mampuan secara terus-menerus untuk dapat memperoleh makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik melalui pembelian makanan atau produksi akan pentingnya pengetahuan mengonsumsi makanan sehat dan bernutrisi. Dan kerawanan pangan kronis juga berakar pada kemiskinan, sedangkan kerawanan pangan sementara di sisi lain adalah penurunan sementara kepada sebuah rumah tangga untuk kurangnya literasi akan pentingnya memenuhi makanan yang sehat yang dibutuhkan oleh tubuh agar dapat hidup sehat dengan baik (Pandya-Lorch, 1992. Hal. 6).

Namun, kelebihan pangan di tingkat nasional atau regional tidak serta merta mengarah pada ketahanan pangan di tingkat individu atau keluarga. Hal ini terlihat dari meningkatnya masalah gizi buruk dan kelaparan akibat krisis ekonomi. Oleh karena itu, akses individu terhadap komoditas pangan pokok sangat penting dalam pencapaian ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kapasitas individu untuk mengakses pangan yang mereka butuhkan sangat dipengaruhi oleh daya beli, pendapatan, harga, proses distribusi, komunitas lokal, dan faktor sosial lainnya.

Sebagaimana dinyatakan Reutlinger (1987), konsep keamanan pangan bersifat kompleks dan luas, serta dapat ditafsirkan dalam berbagai cara karena melibatkan banyak aspek. Setiap orang mencoba melakukannya berdasarkan tujuan mereka dan data yang tersedia (Reutlinger, 1997).

Braun (1992) juga menyatakan bahwa penggunaan istilah keamanan pangan dapat menimbulkan perdebatan dan berbagai pertanyaan kompleks karena komponen keamanan pangan beragam, namun pada saat yang sama merupakan konsep penting bagi banyak orang di seluruh dunia (Braun , Kumar & Pandya-Lorch, 1992).

Selain itu, gagasan tentang keamanan pangan telah berkembang seiring berjalannya waktu. Selama tahun 70an, penekanannya adalah pada pasokan pangan nasional dan global dibandingkan dengan akses individu atau keluarga. Namun, menjelang akhir tahun 1980-an, fokusnya beralih ke akses pangan pada tingkat individu dan rumah tangga. Pada awalnya, pertanyaan adalah apakah dunia mampu memproduksi cukup pangan, tetapi akhirnya pertanyaan itu dirinci lebih lanjut oleh *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menjadi: "Apakah dunia mampu memproduksi cukup pangan pada tingkat harga yang terjangkau oleh kelompok miskin?" Namun, sejak awal tahun 90-an, pertanyaan tersebut telah menjadi jauh lebih kompleks: "Apakah dunia dapat memproduksi cukup pangan pada tingkat harga yang terjangkau oleh kelompok miskin dan tanpa merusak lingkungan?" Secara umum, keamanan pangan berarti bahwa akses ke pangan bagi semua rumah tangga dan individu selalu dijamin agar mereka dapat bekerja dan menjalani hidup sehat.

Konferensi FAO tahun 1984, sebagaimana diuraikan oleh Soetrisno (1995), membentuk dasar konsep keamanan pangan, yang pada intinya menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi manusia dan memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh pangan. Konsep keamanan pangan ini kemudian lebih diperinci dalam *International Congress of Nutrition* (ICN) yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1992, sebagaimana dijelaskan dalam Suhardjo (1996), sebagai berikut:

“Ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari (Suhardjo, 1996).”

Namun pada pertemuan *Committee on Work Food Security* tahun 1995, definisi tersebut diperluas dengan mewajibkan komponen budaya dalam penerimaan sistem pangan (Soetrisno, 1995). Definisi ini didokumentasikan dalam Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Dunia, serta rencana tindak lanjut Konferensi Pangan Dunia (KTT) tahun 1996, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan tercapai ketika setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengakses pangan yang aman secara fisik, dan cara keuangan, selalu, dan makanan bergizi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka dalam hidup aktif dan sehat.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Deklarasi Roma menganut konsep ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Namun gagasan ketahanan pangan di Indonesia mencakup aspek keamanan, mutu, dan keanekaragaman. , hal-hal tersebut merupakan komponen penting dalam konsep ketahanan pangan dan harus diatasi agar pangan dapat disediakan secara utuh dan merata kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, pada lokakarya ketahanan pangan tahun 1996 juga diperkenalkan konsep ketahanan pangan rumah tangga yang diuraikan sebagai berikut : Ketahanan pangan rumah tangga mengacu pada kemampuan anggota rumah tangga ketika menyediakan pangan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu, baik dari kegiatan produksi maupun pembeliannya baik dari segi jumlah maupun kuantitas, kualitas dan keanekaragamannya sesuai dengan iklim dan budaya masyarakat setempat, hal ini akan memungkinkan mereka hidup sehat dan efektif, konsep ketahanan pangan juga berlaku pada pangan. Situasi yang berbeda, termasuk tingkat global, nasional, regional (regional), rumah tangga dan individu (Soehardjo,

1996).



Permasalahan ketahanan pangan merupakan sebuah hierarki bertingkat yang ada pada tingkat global, nasional, regional, lokal, rumah tangga, dan individu. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ketahanan pangan rumah tangga penting, hal ini tidak dapat menjamin ketahanan pangan pribadi. Korelasi antara ketahanan pangan individu dan rumah tangga bergantung pada beberapa faktor, antara lain distribusi dan penyiapan makanan dalam rumah tangga, status kesehatan anggota rumah tangga, dan kebersihan lingkungan setempat. Selain itu, ketahanan pangan individu dan rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan pasangan, budaya lokal, dan infrastruktur. (Simatupang, 1999).

Uraian di atas menjelaskan bahwa gagasan atau pemahaman tentang keamanan pangan cukup luas dan beragam. Namun, luasnya dan beragamnya konsep ketahanan pangan menjadikan penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi manusia, serta setiap individu selalu dapat mengakses pangan sesuai kebutuhan agar tetap sehat dan berpartisipasi dalam aktivitas di luar ruangan. Sejalan dengan konsep menjamin dan memenuhi kebutuhan pangan setiap individu, penting juga untuk memperhatikan volume, kualitas, keamanan, budaya dan keberlanjutan produksi dan akses pangan. Dalam perumusan kebijakan dan penelitian empiris mengenai ketahanan pangan, konsep ketahanan pangan harus dihubungkan dengan beberapa dimensi objektif yang terstruktur secara hierarki, mulai dari tingkat individu, rumah tangga, komunitas, regional, nasional, dan global.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis akan melampirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis. Dan tinjauan penelitian terdahulu yang dijadikan inspirasi oleh penulis yang pertama adalah sebuah skripsi dengan judul ‘ Peran Worl Food Programme (WFP) Dalam Mengatasi Krisis Pangan di Republik Demokratik Kongo Tahun 2016-2019 ‘. Penelitian ini menganalisis penggunaan teori organisasi internasional karena penelitian ini menggunakan program bantuan WFP sebagai organisasi internasional, mulai dari bantuan kepada masyarakat terdampak konflik, masyarakat miskin, pengungsi, bantuan pangan untuk mengurangi penyebaran Ebola dan bantuan gizi. Untuk anak-anak Anak-anak di sekolah. Pada masa darurat pangan di Republik Demokratik Kongo, WFP memprioritaskan Republik Demokratik Kongo untuk segera menerima bantuan pangan guna mengatasi krisis pangan di Republik Demokratik Kongo untuk meminimalisir terjadinya bencana, termasuk krisis gizi pada anak-anak.

Analisis penelitian ini menjelaskan fakta bahwa permasalahan krisis pangan di Republik Demokratik Kongo sudah ada sejak Republik Demokratik Kongo memperoleh kemerdekaan, yang semakin diperburuk dengan adanya dua perang. Perang besar mempunyai dampak jangka panjang terhadap perekonomian. krisis pangan. Rentetan konflik yang panjang telah menyebabkan tingginya tingkat kerawanan pangan dan meningkatnya jumlah masyarakat kurang gizi dan malnutrisi, Republik Demokratik Kongo masuk dalam klasifikasi IPC 3 untuk mendukung kehidupan darurat. Penyebab krisis pangan yang sedang berlangsung

di Republik Demokratik Kongo adalah peperangan internal yang disebabkan oleh isu politik pada tahun 2016. Keputusan Presiden Joseph Kabila untuk menyimpang dari konstitusi negara tersebut dimaksudkan untuk menambah masa jabatannya di Republik Demokratik Kongo. Perselisihan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi internal di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2016, yang kemudian diikuti dengan penurunan pada tahun 2019, ketika konflik tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah pengungsi akibat kekerasan, mencapai 5,7 juta pada bulan Desember 2019. Produk pertanian tidak dapat didistribusikan ke pasar nasional atau harga pangan global akan meningkat, hal ini akan memperburuk situasi masyarakat yang rawan pangan di Kongo (Rahayu, 2023).

Penelitian kedua, adalah sebuah skripsi dengan judul “Peran Food Agriculture Organization (FAO) Melalui World Food Programme (WFP) Dalam Penanganan Krisis Pangan di Yaman”. Penelitian ini menggunakan konsep peran, hubungan internasional, ketahanan pangan, human security dan teori organisasi internasional. Menyelidiki berbagai cara terjadinya konflik di berbagai wilayah, baik antara pemerintah dan kelompok pemberontak, antar negara, atau antara warga sipil dan milisi, yang semuanya dapat berdampak negatif terhadap stabilitas pertanian dan produksi pangan berkelanjutan. Penyebab lain terjadinya krisis pangan selain perang, kekerasan dan konflik bersenjata antara lain adalah krisis pangan itu sendiri, seperti yang terjadi di Yaman, juga di negara-negara lain. Krisis pangan yang terjadi menimbulkan perselisihan baru, khususnya munculnya perilaku kriminal di bidang pangan, hal ini menyebabkan banyak orang meninggal

dunia untuk bertahan hidup. Dan komunitas internasional tentunya tidak akan membiarkan terus terjadinya kelaparan di sebagian besar belahan dunia, khususnya di wilayah konflik (Prianggi, 2018).

Penelitian ketiga, yang berkaitan dengan peranan World Food Programme terhadap krisis pangan ialah “Peranan *World Food Programme* (WFP) Melalui *Program Food For Assets* (FFA) Dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan Di Indonesia”.

Penelitian ini menggambarkan fungsi *World Food Programme* melalui program *Food for Assets* (FFA), dalam rangka mengurangi kemungkinan kerawanan pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat yang dianggap sebagai salah satu wilayah paling rentan di Indonesia terkait dengan krisis pangan. persiapan. Ini sudah final. dan kapasitas untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Inisiatif WFP dimaksudkan untuk mengembangkan strategi alternatif untuk memerangi risiko kerawanan pangan sekaligus meningkatkan keamanan pangan, strategi ini akan bergantung pada adanya perubahan iklim. Misalnya, WFP akan memanfaatkan berbagai sumber dayanya dalam konteks program Pangan. Selain itu, wilayah Nusa Tenggara juga memiliki beberapa permasalahan terkait dengan Program Pangan Dunia, permasalahan utamanya adalah sulitnya menjangkau wilayah aman pangan melalui jalan darat (Dewanti, 2018).